



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI**

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2011-2012  
Masa Persidangan : II  
Rapat ke : --  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Dengan : Menteri Kesehatan RI  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Senin, 21 Nopember 2011  
Pukul : 10.00 WIB – selesai  
Acara : 1. Membahas Rincian Penggunaan Dana Optimalisasi Non Pendidikan dan Tambahan Anggaran Pendidikan TA 2012  
2. Membahas tentang permasalahan Jamkesmas dan Jampersal.  
3. Laporan dan penjelasan mengenai Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2011.  
4. Perkembangan penyusunan RPP tentang Badan Pengawas Rumah Sakit.  
5. Lain-lain.  
Ketua Rapat : dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR-RI  
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1  
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat  
Jumlah Kehadiran : 33 orang dari 47 Anggota Komisi IX DPR RI, izin 7 orang.

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dibuka pukul 10.30 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI menyetujui penggunaan alokasi anggaran tambahan Kementerian Kesehatan RI Non Pendidikan sebesar **Rp1.534.500.000.000,-** (*Satu Trilyun Lima Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*) dan tambahan pendidikan sebesar **Rp50.000.000.000,-** (*Lima Puluh Milyar Rupiah*) untuk penguatan pelayanan di Rumah Sakit dalam hal peningkatan kelas III, Instalasi Gawat Darurat (IGD), *Intensive Care Unit* (ICU), PONEK, PONEK; pengembangan puskesmas dan puskesmas perawatan; serta peningkatan status gizi.
2. Dalam rangka persiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan yang sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk:
  - meningkatkan upaya terobosan di dalam pelaksanaan Jampersal dan Jamkesmas
  - mengevaluasi pelaksanaan BOK (Bantuan Operasional Kesehatan)
  - mempersiapkan kebutuhan regulasi/pengaturan PP dan Peraturan Presiden sesuai dengan UU SJSN dan UU BPJS termasuk penyelesaian RPP tentang Badan Pengawas Rumah Sakit
  - mempersiapkan pelayanan kesehatan yang memadai (*benefit packages*, fasilitas kesehatan termasuk penambahan tempat tidur kelas III, standar pelayanan, jaringan pelayanan, dan tenaga kesehatan)
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan upaya surveilans dan monitoring pelayanan kesehatan haji sehingga dapat meminimalisir jumlah kasus penyakit dan angka kematian.
4. Komisi IX DPR RI akan membentuk 2 (dua) Panitia Kerja (Panja) yaitu:
  - Kesehatan Haji untuk mengelaborasi segala permasalahan kesehatan haji dan memberikan rekomendasi penyelesaiannya.
  - Persiapan untuk Jaminan Kesehatan untuk mengevaluasi pelaksanaan Jamkesmas dalam rangka persiapan pelaksanaan BPJS Kesehatan pada tahun 2014.
5. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk memberikan data, paling lambat tanggal 28 November 2011, mengenai:

- fasilitas kesehatan tingkat I dan lanjutan yang memiliki Perjanjian Kerjasama dengan program Jamkesmas
- penambahan kekurangan tempat tidur kelas III RSUD dan Puskesmas Perawatan serta transformasi Puskesmas Tahun 2011
- rumah Sakit pemerintah dan pemerintah daerah yang menerima dana APBN Tahun 2011
- daftar rumah sakit dan Puskesmas yang memberikan pelayanan jamu
- data rincian PHLN (Pinjaman, Hibah Luar Negeri)

Rapat diakhiri pada pukul 16.15 WIB

Menteri Kesehatan RI,



dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH

Jakarta, 21 Nopember 2011  
Pimpinan Komisi IX DPR-RI  
Ketua,



dr. Ribka Tjiptaning  
A-342